

## **Implementasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Keuangan yang Transparan untuk Mendukung Tata Kelola di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

**Mutiara Rachma Ardhiani<sup>1</sup>, Yuni Sukandani<sup>2</sup>, Aji Prasetyo<sup>3</sup>, Suharyanto<sup>4</sup>, Moch.  
Munir Rachman<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

<sup>4,5</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

E-mail : [mutiara@unipasby.ac.id](mailto:mutiara@unipasby.ac.id)

---

### **ABSTRAK**

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada pencatatan dan pelaporan keuangan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan dilaksanakan pada periode 15 Agustus hingga 15 September 2025, dengan pendekatan partisipatif dan berbasis praktik. Dampak pelatihan meliputi adanya peningkatan kualitas pencatatan keuangan yang lebih sistematis, terorganisir, dan mudah dipahami. Dalam hal transparansi, laporan keuangan yang dikategorikan dengan jelas lebih mudah dipahami oleh pihak internal maupun eksternal. Dari sisi akuntabilitas, perubahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan membantu memastikan bahwa semua pembayaran dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa transparansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan dapat menjadi pondasi bagi pengembangan sistem informasi keuangan yang lebih terintegrasi di masa depan.

**Kata kunci** : Transparansi, Akuntabilitas, Good Governance, Pelaporan Keuangan, Standar Keuangan.

### **ABSTRACT**

*This community service aims to improve transparency and accountability in financial recording and reporting at the Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo. The activity was carried out from August 15 to September 15, 2025, using a participatory and practice-based approach. The impact of the training included improvements in the quality of financial recording, which became more systematic, organized, and easier to understand. In terms of transparency, clearly categorized financial reports are easier to understand by both internal and external parties. From an accountability perspective, changes in financial recording and reporting help ensure that all payments and expenditures can be clearly accounted for. This activity also demonstrates that transparency in financial recording and reporting can be the foundation for the development of a more integrated financial information system in the future.*

**Keywords** : *Transparency, Accountability, Good Governance, Financial Reporting, Financial Standards.*

---

### **PENDAHULUAN**

Salah satu prinsip utama dalam menjalankan organisasi sektor publik adalah tata kelola yang baik, atau tata kelola yang baik (Manossoh, 2015). Untuk memberikan pelayanan yang optimal dan memperoleh legitimasi masyarakat, transparansi,

akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran adalah pilar utama (Costari & Belinda, 2021). Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang memadai, konsisten, dan transparan merupakan alat penting untuk mewujudkan tata kelola tersebut (Trisakti et al., 2023). Pelaporan dan catatan keuangan yang jelas sangat penting karena merupakan tanggung jawab administratif dan berfungsi sebagai alat untuk pengendalian dan pengambilan keputusan internal (Costari & Belinda, 2021; Jati, 2019). Pencatatan yang akurat mengurangi kesalahan dan penyimpangan karena memungkinkan setiap transaksi keuangan dapat ditelusuri dengan jelas (Purnama Sari et al., 2020). Pelaporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan efektivitas pengeluaran, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah (Amelia & Hidajat, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pencatatan dan pelaporan bukan hanya persyaratan dari peraturan, tetapi juga bagian dari membangun budaya kerja yang berintegritas dan professional (Jati, 2019; Kewo & Tanor, 2020; Suherman et al., 2025).

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab secara strategis untuk meningkatkan literasi masyarakat, menyediakan layanan pendidikan non-formal, dan mengelola arsip daerah. Dinas ini mengawasi pembagian anggaran pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program dan layanan publik bekerja dengan baik. Pengelolaan administrasi keuangan membutuhkan sistem pencatatan yang lebih konsisten dan efektif seiring dengan peningkatan sistem pemerintahan yang berbasis akuntabilitas dan transparansi (Karjuni & Maani, 2009). Saat ini, ada beberapa proses administrasi yang perlu diperbaiki. Ini terutama terkait dengan digitalisasi pencatatan, penyelarasan format dokumen, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi dan teknologi informasi. Untuk memastikan konsistensi data, ketepatan waktu penyusunan laporan, dan kemudahan dalam proses evaluasi dan audit keuangan, diperlukan upaya penguatan. Diharapkan dengan meningkatkan sistem dan kemampuan aparatur, tata kelola keuangan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo akan menjadi lebih jelas, kredibel, dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.

Pengabdian kepada masyarakat ini mencakup upaya tim pelaksana untuk mewujudkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih transparan, akurat, dan sesuai standar. Ini termasuk pembuatan prosedur teknis pencatatan, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan aparatur, dan penggunaan teknologi untuk mempermudah dokumentasi keuangan. Diharapkan tata kelola keuangan dinas ini akan semakin baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai hasil dari sistem yang lebih terorganisir dan terbuka.

Tujuan dari pengabdian ini adalah menganalisis kondisi pencatatan dan pelaporan keuangan yang selama ini diterapkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, serta membantu aparat dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Melalui kegiatan ini, diharapkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih terbuka, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku akan dibuat. Selain itu, pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami prosedur pencatatan keuangan serta mendorong pemanfaatan teknologi sederhana yang

mendukung keterbukaan informasi. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan tata kelola di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan oleh Tim Dosen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, yang terdiri dari:

1. Mutiara Rachma Ardhiani, S.E., M.A
2. Dra. Yuni Sukandani, S.E., M.M
3. Dr. Aji Prasetyo, S.E.I., M.SA
4. Drs. Suharyanto, M.M
5. Dr. Drs. Ec. Moch. Munir Rachman, M.Si

Metode pelaksanaan mencakup tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. Tahap Persiapan. Untuk membuat rencana kegiatan yang lebih relevan dan tepat sasaran, tim pengabdian berkomunikasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo untuk menemukan masalah pencatatan dan pelaporan keuangan utama. Selain itu, dilakukan observasi langsung di lokasi untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi sistem pencatatan yang berjalan.
2. Tahap Pelaksanaan. Pada tahap ini, dilakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan yang difokuskan pada:
  - a. Memahami prinsip-prinsip pencatatan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku di lembaga pemerintah
  - b. Menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel
  - c. Menggunakan aplikasi atau teknologi sederhana untuk mendukung proses pencatatan dan pelaporan yang teratur.
  - d. Tahap Evaluasi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan. Dua metode digunakan untuk menilai: evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses melihat keterlibatan peserta, kelancaran kegiatan, dan kesesuaian materi dengan kebutuhan dinas. Evaluasi hasil melihat seberapa baik peserta memahami materi melalui kuesioner dan diskusi tentang pencatatan keuangan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### ***Kondisi Awal Sistem Pencatatan dan Pelaporan Keuangan***

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo telah menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah daerah. Namun, untuk melengkapi sistem yang ada, beberapa proses pencatatan dan pengarsipan bukti transaksi masih dilakukan secara manual pada tingkat operasi administratif sehari-hari. Dengan keadaan ini, lebih banyak konsistensi dan efisiensi diperlukan, terutama dalam hal pembuatan dokumen pendukung dan laporan kegiatan.

### ***Pelaksanaan Pendampingan Teknis***

Melalui pendekatan partisipatif, tim mendampingi langsung kegiatan pengabdian ini. Proses pendampingan mencakup praktik bersama dengan pegawai yang menangani pencatatan keuangan selain penyebaran materi.

1. Menata bukti transaksi. Setiap dokumen pengeluaran dan penerimaan disusun secara sistematis sesuai urutan tanggal dan jenis transaksi untuk membuatnya mudah ditelusuri
2. Mengadopsi format pencatatan yang lebih standar
3. Membuat laporan keuangan yang jelas Tim menyarankan penggunaan spreadsheet untuk memudahkan klasifikasi dan perhitungan otomatis untuk tugas administrasi sehari-hari. Pegawai dilatih untuk menyajikan laporan dengan pembagian pos-pos yang jelas sehingga semua anggaran dapat dilihat
4. Diskusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan lapangan karena pegawai diberi kesempatan untuk menjelaskan kesulitan pencatatan keuangan sehari-hari.



**Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan**

### ***Perubahan dan Peningkatan Kapasitas***

Setelah mendapatkan bantuan pelatihan, pegawai telah meningkatkan pencatatan keuangan mereka. Kesadaran pegawai akan pentingnya keterbukaan laporan keuangan meningkat, dan mereka mulai terbiasa menggunakan format spreadsheet yang memudahkan rekapitulasi. Ini ditunjukkan dengan upaya pegawai untuk menambahkan rincian dalam laporan agar lebih mudah dipahami oleh pimpinan dan pihak eksternal.

### **DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN**

Tata kelola di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo sangat dipengaruhi oleh upaya pendampingan untuk menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan yang jelas. Tidak hanya administrasi keuangan menjadi lebih baik, tetapi ini juga mengubah cara pegawai berpikir dan bertindak saat menjalankan fungsi tata kelola. Pertama, dari sudut pandang teknis administratif, pendampingan ini menghasilkan

laporan keuangan yang lebih sistematis, terorganisir, dan mudah dipahami. Format pencatatan yang konsisten memudahkan rekonsiliasi data dan mengurangi kemungkinan duplikasi dan kesalahan pencatatan. Laporan bulanan dan tahunan dibuat lebih cepat karena kondisi ini, sehingga lebih tepat waktu dan relevan untuk kebutuhan manajemen dan tanggung jawab public (Amelia & Hidajat, 2025; Promika & Astuti, 2024).

Kedua, dalam hal transparansi, laporan keuangan yang dikategorikan dengan jelas lebih mudah dipahami oleh pihak internal maupun eksternal. Transparansi ini sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga public (Karjuni & Maani, 2009; Suherman et al., 2025). Dengan kepercayaan ini, Dinas akan lebih dipercaya sebagai organisasi yang dikelola secara profesional dan akuntabel (Suherman et al., 2025). Ketiga, dari sisi akuntabilitas, perubahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan membantu memastikan bahwa semua pembayaran dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Hal ini sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang menekankan tanggung jawab pengelolaan sumber daya publik dan keterbukaan informasi (Manossoh, 2015). Adanya sistem pencatatan yang lebih jelas mengurangi kemungkinan kesalahan administrasi, penyimpangan, atau kesalahan pelaporan (Kewo & Tanor, 2020; Marlina, 2018).

Keempat, dampak jangka panjang dari kegiatan ini adalah terciptanya budaya organisasi yang lebih tertib dan berorientasi pada akuntabilitas. Transformasi budaya ini penting karena tata kelola yang baik tidak dapat bertahan hanya dengan instruksi teknis, tetapi harus ditopang oleh kesadaran bersama dalam menjaga keterbukaan dan ketertiban administrasi (Amelia & Hidajat, 2025; Sulistiani, 2017). Terakhir, kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa transparansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan dapat menjadi pondasi bagi pengembangan sistem informasi keuangan yang lebih terintegrasi di masa depan. Meski saat ini penerapannya masih berbasis aplikasi sederhana, pengalaman yang diperoleh pegawai dapat menjadi bekal ketika dinas mengadopsi sistem digital yang lebih komprehensif. Dengan demikian, hasil kegiatan ini tidak hanya memberi solusi jangka pendek, tetapi juga membuka jalan bagi penguatan tata kelola jangka panjang.

## **SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dapat menjadi alat strategis untuk mendukung tata kelola yang baik. Pelatihan, simulasi, dan pendampingan teknis membantu aparatur memperoleh keterampilan tambahan dalam menata bukti transaksi, menggunakan format pencatatan yang lebih standar, dan membuat laporan keuangan yang informatif dan akuntabel.

Agar manfaat kegiatan ini berkelanjutan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

1. **Konsistensi Penerapan.** Untuk membuat administrasi lebih efisien dan akuntabel, karyawan harus memastikan bahwa prosedur pencatatan dan pelaporan sesuai dengan standar.

2. Pengembangan SDM. Secara teratur, aparaturnya memerlukan pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Ini terutama terkait dengan penggunaan teknologi pencatatan dan penyusunan laporan yang sesuai dengan peraturan pemerintah daerah.
3. Monitoring dan Evaluasi Internal. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dan mengurangi kesalahan dan penyimpangan, organisasi harus melakukan evaluasi keuangan secara teratur.
4. Penguatan Teknologi. Pencatatan, pelaporan, dan pengawasan akan lebih efektif dan efisien jika sistem aplikasi terintegrasi dengan sistem informasi keuangan daerah di masa depan.
5. Dukungan Manajerial dan Kelembagaan. Keberhasilan perubahan sistem bergantung pada komitmen pimpinan instansi, sehingga kebijakan harus mendukung, fasilitas harus disediakan, dan regulasi internal harus diperkuat agar transparansi dan akuntabilitas tetap ada.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada seluruh Tim Dosen dan Mahasiswa yang telah ikut serta berpartisipasi dalam program pengabdian masyarakat ini, tidak lupa ucapan terima kasih kami tujukan untuk Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo dan seluruh jajarannya yang telah hadir dan bersedia untuk dilakukan pendampingan serta pelatihan dari tim kami. Selain itu terima kasih juga kepada LPPM Universitas PGRI Adi Buana yang telah memberikan bantuan pendanaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amelia, H. L., & Hidajat, S. (2025). Pengaruh Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Instansi Publik. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 562–573. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1699>
- Costari, N., & Belinda, P. A. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–77.
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 22(1), 1–14.
- Karjuni, & Maani, D. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *DEMOKRASI*, 8(1).
- Kewo, C. L., & Tanor, L. A. O. (2020). Apakah Good Government Governance dan Pengendalian Intern dapat Mempengaruhi Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan Sektor Publik? *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 11(1), 930–935.
- Manossoh, H. (2015). Implementasi sistem akuntansi pemerintahan dalam mewujudkan good government governance pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).

- Marlena, V. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu (Studi Kasus: BPKD, Inspektorat, DPMD dan DPRD di Provinsi Bengkulu). *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 1(2), 39–49.
- Promika, A., & Astuti, B. (2024). Literatur Review : Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 2(2), 646–654.
- Purnama Sari, R., Setia Mulyani, C., & Setyo Budiarto, D. (2020). Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta*, 6(1). [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)
- Suherman, Kurniawan, T. L., & Syaifullah. (2025). Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Yang Berkeadilan, Transparansi, dan Akuntabilitas. *Unizar Law Review*, 8(1), 134–141. <https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1.97>
- Sulistiani, D. (2017). Good Government Governance Menuju Pemerintahan Yang Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN). *El-Muhasaba*, 8(1).
- Trisakti, F., Berliana, A. D. D., Bukhori, A., & Fitri, A. (2023). Transparansi Dan Kepentingan Umum. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1). <http://jurnaldialektika.com>